

**PERUBAHAN RENCANA
KERJA 2024
KECAMATAN SEMAMPIR**



KOTA SURABAYA

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU	16
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan capaian Renstra PD	16
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD	20
2.3 Isu-isu Penting penyelenggara Tugas dan Fungsi PD	38
2.4 Review Terhadap Ranwal PD	39
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...	40
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PD	
3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional	43
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	
4.1 Program dan Kegiatan.....	45
PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah

Renja PD adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD adalah dokumen rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Kerangka regulasi adalah sekumpulan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundangundangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Kecamatan Semampir sebagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya menyusun dokumen Renja PD Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Kerja Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.1.2 Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut dan digambarkan pada diagram Gambar I.1

1. Persiapan Penyusunan Renja PD

Persiapan penyusunan renja meliputi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD

2. Penyusunan Renja PD

Perangkat Daerah menyusun Ranwal Renja PD paling lambat minggu pertama bulan Desember. Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rencana Strategis (Renstra) PD;
- b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu; dan
- c. Hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.

Penyusunan Ranwal Renja PD mencakup:

- a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah
- b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu

Hasil perumusan Ranwal Renja PD, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. Pendahuluan
- b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup

3. Penyusunan Renja PD

Penyusunan Renja PD merupakan proses penyempurnaan Ranwal Renja PD berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Renja PD. Renja PD tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan Renja PD disampaikan kepada kepala BAPPEDA kabupaten/kota untuk diverifikasi. Rencana Kerja Kecamatan Semampir 2024 disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap Renja PD

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengantugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja PD. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Surat Edaran Kepala Daerah diterima. Hasil pembahasan Renja PD dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
5. Perumusan Renja PD dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Renja PD disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi Renja PD kepada Perangkat Daerah untuk disempurnakan dan

disampaikan kembali kepada kepala BAPPEDA.

6. Penetapan BAPPEDA menyampaikan seluruh Renja PD yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada Penetapan Renja PD paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Renja PD yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Gambar I.1 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Penyusunan Renja Kecamatan Semampir Tahun 2024 menjabarkan rencana kegiatan Kecamatan Semampir yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya.

I.1.3 Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

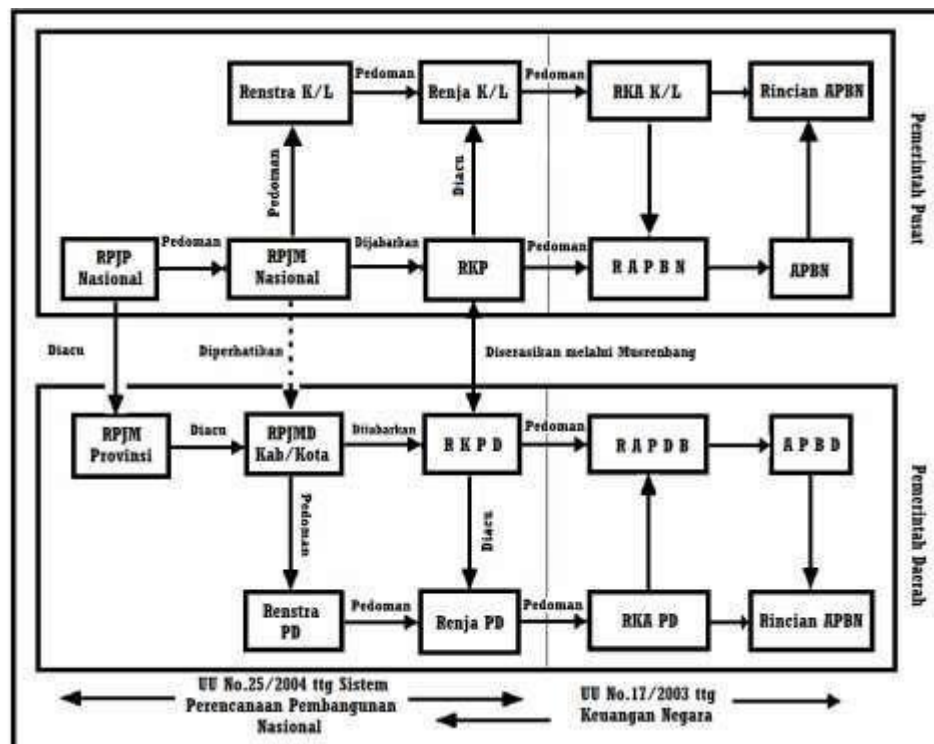
Penyusunan Renja Kecamatan Semampir dari tahap dokumen Ranwal Renja PD sampai dengan dokumen Renja PD dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu Renstra Kecamatan Semampir Tahun 2021-2026 serta Rancangan Akhir, Ranwal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024.

Pada penyusunan Renja PD berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

- a. Berpedoman pada Renstra PD, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja PD dengan Renstra PD.
- b. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja PD tahun lalu dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja PD dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra PD.

Adapun gambaran tentang hubungan antara Renja PD dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan dapat ditunjukkan pada Gambar I.2:

Gambar I.2
Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Kerja Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kota Surabaya tahun 2021-2026.
6. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah Kepada Kecamatan ;
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Surabaya Surabaya.
8. Perwali No.69 Tahun 2023 tentang RKPD Kota Surabaya Tahun 2024.
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

I.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan OPD

Tugas dan fungsi serta susunan organisasi Kecamatan Semampir mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021.

Berdasarkan ketentuan tersebut dalam Pasal 7 Perwali No.94 Tahun 2021, Kecamatan Semampir memiliki tugas :

1. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;

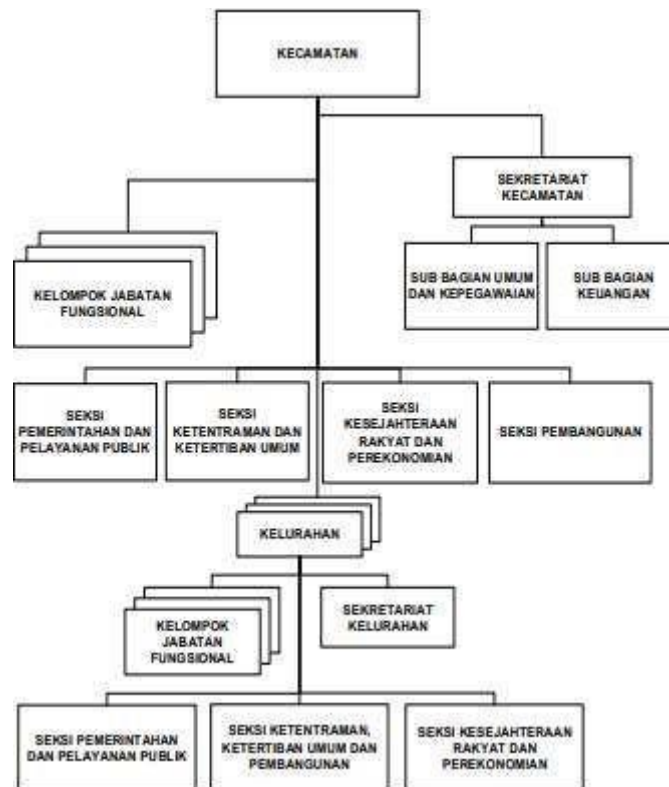
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi kegiatan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja daerah yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
10. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kecamatan Semampir dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis;
2. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis;
3. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lainnya;
4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
6. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar I.3

Struktur Organisasi Kecamatan Semampir



I.2.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Peraturan-peraturan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir

Peraturan Daerah tentang Rencaa Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota.
- 13 Perwali No.69 Tahun 2023 tentang RKPD Kota Surabaya Tahun 2024.

I.3 Maksud dan Tujuan

I.3.1 Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Renja Kecamatan Semampir Tahun 2024 disusun dengan maksud :

1. Menjabarkan rencana jangka pendek (1 tahun) untuk tahun 2023 pada Kecamatan Semampir
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Semampir dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada dan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Semampir

I.3.2 Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan disusunnya Renja Kecamatan Semampir Tahun 2024 adalah:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semampir dalam jangka waktu 1 tahun
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Semampir Tahun Anggaran 2024
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam dokumen Rencana Kerja Kecamatan Semampir Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan PD dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (review) hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah bersangkutan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rencana Kerja, berisikan uraian mengenai:

1. Membandingkan antara Rencana Kerja RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rencana Kerja RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rencana Kerja RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang di usulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB III HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah** Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

4.1 Program dan Kegiatan Pada bagian ini dijelaskan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Kerja RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
4. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C33.

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun 2022 Kecamatan Semampir melaksanakan 11 (sebelas) program yang dijabarkan menjadi 11 (sebelas) kegiatan. Kecamatan mendukung program yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi dalam ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Tabel T-C.29.

Sedangkan pada tahun 2023, Kecamatan Semampir melaksanakan 6 (enam) program yang dijabarkan menjadi 11 (sebelas) kegiatan 11 (sebelas) sub kegiatan sesuai dengan dokumen Renstra PD Tahun 2021- 2026 yang telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026.



Dari tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Kecamatan Semampir tahun 2022 dapat dijelaskan kinerja masing-masing program dan kegiatan sebagai berikut: (semua disesuaikan tahun 2022)

1. Program yang telah memenuhi target kinerja 100 % adalah sebagai berikut :

a. Program Penegakan Peraturan Daerah

Program Penegakan Peraturan Daerah dilaksanakan Kecamatan Semampir melalui kegiatan Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja. Program ini diukur dengan indikator kinerja persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum dengan target tahun 2019 sebesar 100% dan dapat direalisasi sebesar 100% sehingga capaian sebesar 100%. Sedangkan kegiatan diukur dengan indikator kinerja jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja dengan target sebanyak 360 kali dan dapat direalisasi sebesar 360 kali sehingga capaian sebesar 100 %.

b. Program Perlindungan Perempuan dan Anak

Program Perlindungan Perempuan dan Anak dilaksanakan Kecamatan Semampir melalui kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak. Program ini diukur dengan indikator kinerja Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan dengan target tahun 2019 sebesar 100 % dan dapat direalisasi sebesar 100% sehingga capaian sebesar 100%.

Sedangkan kegiatan diukur dengan indikator kinerja Jumlah Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan target sebanyak 116 Kali dan dapat direalisasi sebesar 116 Kali sehingga capaian sebesar 100%.

c. Program Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan dalam Konteks Budaya Lokal

Program Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan dalam Konteks Budaya Lokal dilaksanakan Kecamatan Semampir melalui kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan. Program ini diukur dengan indikator kinerja persentase kader wawasan kebangsaan dengan



target tahun 2019 sebesar 100% dan dapat direalisasi sebesar 100% sehingga capaian sebesar 100%.

d. Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan Kecamatan Semampir melalui kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan dan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah. Program ini diukur dengan indikator kinerja persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral dengan target tahun 2019 sebesar 100% dan dapat direalisasi sebesar 100% sehingga capaian sebesar 100%.

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan diukur dengan indikator kinerja Jumlah lembaga peserta dari seluruh kelurahan di wilayah kecamatan yang mengikuti Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan dengan target sebanyak 4 Lembaga dan dapat direalisasi sebesar 4 Lembaga sehingga capaian sebesar 100%. Sedangkan Kegiatan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah diukur dengan indikator kinerja Jumlah Pelaksanaan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah target sebanyak 60 kali dan dapat direalisasi sebesar 60 kali sehingga capaian sebesar 100%.

e. Program Penataan Daerah Otonom

Program Penataan Daerah Otonom dilaksanakan Kecamatan Semampir melalui kegiatan Operasional pengelolaan Administrasi LPMK, RW, RT. Program ini diukur dengan indikator kinerja persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update dengan target tahun 2022 sebesar 100% dan dapat direalisasi sebesar 100% sehingga capaian sebesar 100%. Sedangkan kegiatan diukur dengan indikator kinerja Jumlah lembaga pelayanan administrasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan mutu selama 12 bulan dengan target sebanyak 636 Lembaga dan dapat direalisasi sebesar 636 lembaga sehingga capaian sebesar 100%.



2. Program yang telah melebihi target kinerja diatas 100% adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dilaksanakan Kecamatan Semampir melalui kegiatan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat. Program ini diukur dengan indikator kinerja Persentase PMKS yang ditangani dengan target tahun 2019 sebesar 60% dan dapat direalisasi sebesar 60,10% sehingga capaian sebesar 100,17%.

b. Program Pengelolaan Kebersihan

Program pengelolaan kebersihan dilaksanakan Kecamatan Semampir melalui kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan. Program ini diukur dengan indikator kinerja Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dengan target tahun 2019 sebesar 6,56% dan dapat direalisasi sebesar 25,52% sehingga capaian sebesar 389,01%.

c. Program Perluasan Jangkauan Pemasaran

Program Perluasan Jangkauan Pemasaran dilaksanakan Kecamatan Semampir melalui kegiatan Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian. Program ini diukur dengan indikator kinerja persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya dengan target tahun 2019 sebesar 53% dan dapat direalisasi sebesar 85% sehingga capaian sebesar 160,38%.

d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan Kecamatan Semampir melalui kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah. Program ini diukur dengan indikator kinerja Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran dengan target tahun 2019 sebesar 76% dan dapat direalisasi sebesar 90,89% sehingga capaian sebesar 119,59%.



3. Program Program yang belum memenuhi target kinerja adalah sebagai berikut :
 - a. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Program Penataan Administrasi Kependudukan dilaksanakan Kecamatan Semampir melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan. Program ini diukur dengan indikator kinerja Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan dengan target tahun 2019 sebesar 100.00% dan dapat direalisasi sebesar 97.47% sehingga capaian sebesar 97.47%.
 - b. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan dilaksanakan Kecamatan Semampir melalui kegiatan Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran. Program ini diukur dengan indikator kinerja Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik dengan target tahun 2019 sebesar 100.00% dan dapat direalisasi sebesar 98,70% sehingga capaian sebesar 98,7%.

Bab II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Semampir pada tahun 2022 diukur melalui beberapa indikator kinerja yang merupakan turunan dari indikator kinerja tingkat kota sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

Indikator sasaran tingkat kota diturunkan menjadi indikator tujuan di tingkat perangkat daerah termasuk kecamatan. Sedangkan indikator program tingkat kota menjadi indikator program di tingkat perangkat daerah termasuk kecamatan. Berikut ini adalah penjabaran kinerja di Kecamatan Semampir.



1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sasaran tingkat kota yang diturunkan menjadi tujuan kecamatan diukur dengan indikator nilai SAKIP dengan target tahun 2022 sebesar > 80-90. Kecamatan bersama dengan OPD lainnya mencapai target indikator tersebut dengan cara menjabarkan kinerja menjadi sasaran, program, dan kegiatan. Tujuan tersebut dijabarkan menjadi sasaran sebagai berikut:

1.1 Meningkatkan Kualitas Pelaporan Kinerja Lembaga Kewilayahan

Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelaporan Kinerja Lembaga Kewilayahan diukur dengan indikator kinerja Persentase Pelaporan Kinerja atau Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Pelimpahan Kewenangan Lembaga Kewilayahan dengan target tahun 2021 sebesar 100%.

Sasaran ini dijabarkan menjadi 4 (empat) program yaitu:

1.1.1 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat

diukur dengan indikator kinerja Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi dengan target tahun 2022 sebesar 100%

1.1.2 Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi dengan target tahun 2021 sebesar 100% dan Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan dengan target tahun 2022 sebesar 100%

1.1.3 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah

diukur dengan indikator kinerja Persentase kegiatan sarana prasaranawilayah yang terfasilitasi dengan target tahun 2022 sebesar 100%

1.1.4 Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan

diukur dengan indikator kinerja Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan dengan target tahun 2022 sebesar 100 %



1.2 Terjaganya kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

Sasaran Terjaganya kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan diukur dengan indikator Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran di Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya dengan target tahun 2022 sebesar 100%

Sasaran ini dijabarkan menjadi 2 (dua) program yaitu:

1.2.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran diukur dengan indikator Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran dengan target pada tahun 2022 sebesar 88%

1.2.2 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan

Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dengan target pada tahun 2022 sebesar 100% dan Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik dengan target pada tahun 2022 sebesar 100%

Adapun gambaran tentang Pencapaian Pelayanan Kinerja Kecamatan Semampir dapat ditunjukkan pada Tabel 2.2 (T-C.30).



Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kec. Semampir Dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan	Target program dan	Realisasi Kegiatan Tahun 2022	Kinerja Tahun	Target program dan kegiatan (Renja)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Perangkat Daerah) Tahun 2024	Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target Renia Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renia Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Perangkat Daerah tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01	KECAMATAN									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,42%	N/A	94.92%	92%	96.92 %	95,17%		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	N/A	100 %	100 %	100.00 %	100 %		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Persentase Pelayanan Gaii dan Tuniangan ASN	N/A	100 %	100 %	100 %	100.00 %	N/A		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target program dan Renia Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Target program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Kec. Semampir)						70 Orang/bulan		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	N/A	100 %	100 %	100 %	100.00 %	100 %		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	N/A	N/A	100 %	100 %	100.00 %	N/A		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Kec. Semampir)						15 Paket		
		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang	N/A	N/A	100 %	100 %	100.00 %	100 %		



Rencana Kerja Kecamatan Semampir
Kota Surabaya Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Perkiraan Realisasi	
			Kinerja	Kinerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian target	
			Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Perangkat daerah Tahun 2022	Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Perangkat Daerah tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		disediakan								
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	N/A	N/A	100 %	100 %	100.00 %	N/A		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Kec. Semampir)						6 Unit		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23.91%	N/A	22.82%	65.34%	286.33 %	23.36%		
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%	N/A	100%	0%	0.00 %	100%		
		Persentase data	100%	N/A	100%	78.78%	78.78 %	100%		

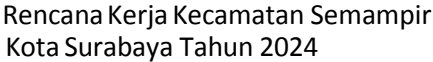


Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program	Realisasi Target Kinerja	Target program dan kegiatan	Realisasi Target Kegiatan	Realisasi Kinerja Tahun	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target Renia Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renia Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah								
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	N/A	N/A	4 Lembaga	4 Lembaga	100.00 %	4 Lembaga		
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									
		Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	N/A	N/A	285 Orang	379 Orang	132.98 %	N/A		
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan						1 Laporan		



Rencana Kerja Kecamatan Semampir
Kota Surabaya Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi	Target	Perkiraan Realisasi	
			Kinerja	Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat	Target	Capaian target	
			Capaian Program (Renstra)	Hasil program dan kegiatan s/d Tahun 2021	Renia Perangkat daerah tahun 2022	Renia Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi (%)	Perangkat Daerah tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Instansi Vertikal Terkait (Kec. Semampir)								
		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	N/A	N/A	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %	1 Bidang Urusan		
		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	N/A	N/A	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %	1 Bidang Urusan		
		Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	N/A	N/A	174 Berkas	18 Berkas	2.43 %	N/A		
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Kec.						10 Dokumen		

[illegible]



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi	Target	Perkiraan Realisasi	
			Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target program Renia Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Kegiatan 2022 Renia Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renia) Perangkat Daerah tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	N/A	N/A	12 Kali	10 Kali	83.33 %	N/A	30 Laporan	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kec. Semampir)								
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%	N/A	100%	100%	100.00 %	100%		
		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.5%	N/A	12.5%	0.7%	5.60 %	37.5%		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	N/A	N/A	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %	1 Kelurahan		
		jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan	N/A	N/A	5 kelurahan	5 kelurahan	100.00 %	5 kelurahan		

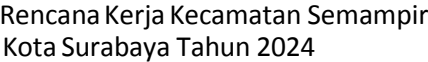


Rencana Kerja Kecamatan Semampir
Kota Surabaya Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Kinerja		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi	
			Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target Renia Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renia Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Tahun		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	konsep inovasi									
		Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	N/A	N/A	10 Kali	5 Kali	50.00 %	N/A			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kec. Semampir)						12 Lembaga Kemasyarakatan			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	N/A	N/A	17 RW	1 RW	5.88 %	N/A			
		Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	N/A	N/A	14 RW	4 RW	28.57 %	N/A			
		Jumlah RW yang usulan	N/A	N/A	12 RW	0 RW	0.00 %	N/A			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		sarana dan prasarananya direalisasikan								
		Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya N/A direalisasikan		N/A	11 RW	2 RW	18.18 %	N/A		
		Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya N/A direalisasikan		N/A	16 RW	3 RW	18.75 %	N/A		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Ujung)						5 Unit		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Sidotopo)						2 Unit		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pegirian)						3 Unit		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonokusumo)						4 Unit		
		Jumlah Sarana dan						2 Unit		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target	Realisasi Target dan Realisasi Kinerja	Target program dan Kegiatan Tahun	Realisasi Kinerja	Target program dan kegiatan (Renja)	Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Perangkat Daerah tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Ampel)								
		Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	N/A	N/A	14 RW	7 RW	50.00 %	N/A		
		Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	N/A	N/A	16 RW	16 RW	100.00 %	N/A		
		Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	N/A	N/A	17 RW	17 RW	100.00 %	N/A		
		Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	N/A	N/A	12 RW	12 RW	100.00 %	N/A		
		Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	N/A	N/A	11 RW	11 RW	100.00 %	N/A		



Rencana Kerja Kecamatan Semampir
Kota Surabaya Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(Kelurahan Ujung)						2 Pokmas / Ormas		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonokusumo)						3 Pokmas / Ormas		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(Kelurahan Ampel)						2 Pokmas / Ormas		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(Kelurahan						3 Pokmas / Ormas		

Sidotopo)

Rencana Kerja Kecamatan Semampir

Jumlah Pokmas
dan Ormas yang

2 Pokmas /
Ormas



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra)	Realisasi Kinerja Target program dan Kegiatan Tahun 2022	Target program dan kegiatan (Renja)	Realisasi Kinerja Target program dan Kegiatan Tahun 2022	Target program dan kegiatan (Renja)	Realisasi Kinerja Target program dan Kegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
			Perangkat Daerah) Tahun 2024	Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target Renia Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renia Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Perangkat Daerah tahun 2023)	8=(7/6)	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pegirian)									
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	N/A	N/A	140 Unit Usaha	116 Unit Usaha	82.86 %	140 Unit Usaha			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	N/A	N/A	48 Kali	74 Kali	154.17 %	N/A			
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kec. Semampir)						4 Laporan			
		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%	N/A	100%	100%	100.00 %	100%			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renia Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renia Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan								
		N/A	N/A		16 Lokasi	20 Lokasi	125.00 %	16 Lokasi		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum								
		N/A	N/A		360 Kali	302 Kali	83.89 %	N/A		
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kec. Semampir)	12 Laporan							



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renia Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renia Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%	N/A	100%	100%	100.00 %	100%		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									
		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	N/A	N/A	210 Kasus	15 Kasus	7.14 %	210 Kasus		
		Jumlah topik fasilitasi, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	N/A	N/A	2 Topik	2 Topik	100.00 %	2 Topik		
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional									
		Jumlah pelaksanaan	N/A	N/A	5 Kali	3 Kali	60.00 %	N/A		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Target Target program dan Kegiatan Tahun 2022						Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target Renia Perangkat daerah tahun 2022	Realisasi Renia Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
			4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Kec. Semampir)						561 Orang		
		Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	N/A	N/A	21 Kasus	15 Kasus	71.43 %	N/A		
		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Kec. Semampir)						4 Laporan		



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Semampir kepada masyarakat berdasarkan peraturan yang ditetapkan serta hasil koordinasi yang intensif dengan perangkat daerah yang terkait dengan ruang lingkup layanan. Selain koordinasi, aspek dalam pelayanan yang akan ditingkatkan antara lain sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi, pengadaan dan pemeliharaan peralatan, penerapan standar operasi prosedur, dan lain-lain.

Masih terdapat permasalahan dan hambatan spek-aspek yang perlu ditingkatkan tersebut. Peningkatan aspek-aspek tersebut membutuhkan dukungan dari OPD lainnya antara lain Badan Kepegawaian dan Diklat serta Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk peningkatan kapasitas dan wawasan sumber daya manusia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait sistem informasi kependudukan, Satuan Polisi Pamong Praja terkait standar operasi prosedur penertiban, dan lain-lain.

Tantangan dan peluang yang dapat ditindaklanjuti oleh kecamatan adalah adanya dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. Masyarakat dapat dilibatkan sebagai kader yang membantu kegiatan terkait kesehatan, perekonomian, kesejahteraan rakyat, penanggulangan bencana, dan lain-lain.

Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah didukung oleh keberhasilan kinerja seluruh perangkat daerah termasuk kecamatan. Kecamatan tidak terkait secara langsung dengan pencapaian indikator *Sustainable Development Goals* (SDG's) namun sebagai aparat kewilayahan kecamatan mendukung pencapaian indikator-indikator tersebut oleh perangkat daerah lainnya.

Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan



Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan menjadi isu penting di masa depan karena melibatkan kepentingan dan/atau kebutuhan masyarakat secara langsung secara berkelanjutan.

Peningkatan aspek-aspek yang terkait pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain kapaitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi terkait perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan daerah, pengadaan dan pemeliharaan peralatan, penerapan standar operasi prosedur, serta koordinasi intensif dengan perangkat daerah lainnya akan dilaksanakan terus menerus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. 4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD (ranwal tidak perlu)

Terdapat beberapa narasi dan output kegiatan yang berbeda antara Rancangan Awal RKPD dengan Renja Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian indikator kinerja, dan perbedaan ini berdampak pada kebutuhan anggaran.

Adapun gambaran tentang perbedaan Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan dapat ditunjukkan pada Tabel 2.3 (T-C.31).



Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kec. Semampir
(Tabel T-C.31)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,17 %	19,189,060,900	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,17 %	19,189,060,900	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	16,871,862,334	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	16,871,862,334	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Semampir	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	16,871,862,334	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Semampir	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	16,871,862,334	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	1,928,879,024	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	1,928,879,024	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Semampir	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	1,928,879,024	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Semampir	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	1,928,879,024	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	388,319,742	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	388,319,742	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Semampir	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100 %	388,319,742	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Semampir	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100 %	388,319,742	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	8,309,574,026	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	8,309,574,026	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %		
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23.36 %				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23.36 %		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga	14,768,487	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga	14,768,487	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Semampir	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	285 Orang	14,768,487	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Semampir	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	285 Orang	14,768,487	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	636 Lembaga	8,252,722,524	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	636 Lembaga	8,252,722,524	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Semampir	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	8,252,722,524	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Semampir	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	8,252,722,524	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	42,083,015	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	42,083,015	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan	Kec. Semampir	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	14 Berkas	15,529,220	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan	Kec. Semampir	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	14 Berkas	15,529,220	



Rencana Kerja Kecamatan Semampir Kota Surabaya Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Non Usaha					Non Usaha					
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Semampir	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	7927 Berkas	16,638,450	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Semampir	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	7927 Berkas	16,638,450	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Semampir	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	9,915,345	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Semampir	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	9,915,345	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	37.5 %	34,456,066,758	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	37.5 %	34,456,066,758	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	34,438,008,070	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	34,438,008,070	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Semampir	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	10 Kali	25,486,022	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Semampir	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	10 Kali	25,486,022	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ujung	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	14 RW	3,409,205,492	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ujung	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	14 RW	3,409,205,492	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sidotopo	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	12 RW	3,550,092,977	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sidotopo	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	12 RW	3,550,092,977	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pegirian	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	11 RW	3,529,472,284	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pegirian	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	11 RW	3,529,472,284	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Wonokusumo	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	16 RW	11,787,794,833	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Wonokusumo	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	16 RW	11,787,794,833	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ampel	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	17 RW	2,504,858,479	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ampel	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	17 RW	2,504,858,479	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ujung	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	14 RW	1,984,155,126	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ujung	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	14 RW	1,984,155,126	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wonokusumo	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	16 RW	2,874,425,736	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wonokusumo	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	16 RW	2,874,425,736	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ampel	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	17 RW	1,469,378,600	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ampel	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	17 RW	1,469,378,600	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sidotopo	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	12 RW	1,660,027,476	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sidotopo	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	12 RW	1,660,027,476	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pegirian	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	11 RW	1,643,111,100	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pegirian	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	11 RW	1,643,111,100	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	140 Unit Usaha	18,058,752	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	140 Unit Usaha	18,058,752	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Semampir	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	18,058,752	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Semampir	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	18,058,752	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	130,336,320	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	130,336,320	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	16 Lokasi	130,336,320	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	16 Lokasi	130,336,320	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Kec. Semampir	Jumlah upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	360 Kali	130,336,320	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Kec. Semampir	Jumlah upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	360 Kali	130,336,320	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	37,860,600	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	37,860,600	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	210 Kasus	37,860,600	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	210 Kasus	37,860,600	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Semampir	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	5 Kali	15,676,000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Semampir	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	5 Kali	15,676,000	
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Semampir	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	210 Kasus	22,184,600	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Semampir	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	210 Kasus	22,184,600	
	TOTAL				62,122,898,600	TOTAL				62,122,898,600	

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dalam 2 (dua) tingkatan yaitu kelurahan dan kecamatan. Keterlibatan di tingkat kelurahan diwadahi dalam forum musyawarah pembangunan kelurahan (musbangkel) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.



Sedangkan keterlibatan masyarakat di tingkat kecamatan diwadahi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan kebijakan melalui Permendagri No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. “Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 ini mengatur dua substansi pokok, yaitu pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagai pedoman pengelolaan kegiatan yang bersumber dari dana kelurahan untuk tahun anggaran 2024”.

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan. Untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan, maka dana kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi sumber daya sendiri.

Kegiatan pemberdayaan yang dimaksud dalam Permendagri Nomor 130, yaitu: pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; pendidikan dan kebudayaan: pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah; lembaga kemasyarakatan; Trantibum dan Linmas; penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa. Untuk penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan yang dalam hal ini sering kita lakukan yaitu dengan musrenbang

Oleh sebab itu ditahun 2024 ini Kelurahan memiliki peranan penting dalam Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan dengan sasaran perangkat daerah Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja lembaga kewilayahan. Dalam program ini kelurahan di tahun 2024 diharapkan dapat mewujudkan usulan

masyarakat yang tertuang dalam Musyawarah Pembangunan atau disingkat Musrenbang

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan pada renja kecamatan Semampir mengacu pada sasaran RPJMD Kota Surabaya tahun 2021-2026 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan Semampir. Tujuan dalam Renja kecamatan Semampir tahun 2024 adalah **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang efektif dan inovatif**, Indikator sasaran Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan, target pada tahun 2024 sebesar 90,16 %.

Pada tujuan ini Kecamatan Semampir berusaha dalam Meningkatkan efektivitas dan kinerja kecamatan Semampir melalui peningkatan kerjasama, penyediaan sarana dan prasarana di seluruh kelurahan serta pengendalian pembangunan yang mengacu pada regulasi dan aturan yang ada untuk mendukung pelayanan publik yang baik. Kecamatan Semampir juga berusaha meningkatkan pelayanan kecamatan dan kelurahan serta Mengoptimalkan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja, kelembagaan, dan ketatalaksanaan.

Adapun Sasaran Renja 2024 pada tujuan ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada kecamatan Semampir.

Indikator sasaran : Nilai SAKIP Kecamatan Semampir, Target sasaran pada Tahun 2024 sebesar 86,72 %

2. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum

Indikator Sasaran : Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum. Target sasaran pada Tahun 2024 sebesar 88,30 %.

3. Meningkatkan kualitas layanan Kecamatan

Indikator Sasaran : Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor Kelurahan dan Kecamatan, target sasarnya pada tahun 2024 sebesar 86,61 %.



Alasan pemilihan indikator SAKIP oleh KemenPan RB diukur menggunakan beberapa Komponen salah satunya pelaporan kinerja. Kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan pelimpahan kewenangan oleh lembaga kewilayahan seharusnya dilaporkan kepada OPD yang berkaitan dan didokumentasikan dengan baik agar dapat dilakukan monitoring serta evaluasi secara berkala.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan kegiatan

4.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Kota Surabaya

Visi dan misi merupakan gambaran apa yang ingin dicapai Kota Surabaya pada akhir periode kepemimpinan walikota dan wakil walikota terpilih, yaitu:

Visi

ke depan menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah, yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu:

***“SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN
BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI”***

Makna dalam visi tersebut adalah :

Sentosa adalah kondisi yang menggambarkan Kota Surabaya sebagai kota yang menjamin warganya dalam keadaan makmur, sehat, aman, selamat dan damai untuk berkarya dan beraktualisasi diri.

Berkarakter menunjukkan bahwa Kota Surabaya sebagai kota yang memiliki watak, kepribadian yang arif dengan mempertahankan budaya lokal, yang tercermin dalam perilaku warga kota yang berlandaskan falsafah pancasila.

Berdaya Saing Global bermakna Kota Surabaya sebagai kota yang mampu menjadi hub/pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional dengan didukung pemerataan akses ke sumberdaya produktif, tata kelola pemerintahan yang baik, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien serta mampu memantapkan usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa dan pengembangan industri kreatif berdaya saing di pasar global.

Berbasis Ekologi adalah prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mewujudkan Kota Surabaya yang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, diantaranya adalah penataan ruangnya dapat mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa



dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mengantisipasi resiko bencana serta melestarikan kawasan pesisir dengantetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.

Penjabaran visi Kota Surabaya selama lima tahun ke depan dituangkan dalam di bawah ini.

Misi

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan menjadi 7 (Tujuh) misi pembangunan kota berikut.

1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas serta memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluasluasnya kesempatan berusaha;
2. Memelihara keamanan dan ketertiban umum;
3. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien;
4. Memantapkan dan memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat;
5. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional serta memantapkan daya saing usaha- usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif;
6. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan;
7. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baikl;

Secara garis besar tujuan dan sasaran perangkat daerah kecamatanSemampir yang tertuang dalam renstra 2021 s.d 2026 masuk dalam misi ke 7 RPJMD Kota Surabaya tahun 2021 s.d 2026



4.1.2. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan kecamatan dijabarkan sebagaimana dalam tabel pencapaian , kajian usulan program / kegiatan dari masyarakat dan penggabungan Prioritas masukan masyarakat serta dengan Perubahan Renja OPD terdahulu .

Bertolak pada Visi, Misi Tujuan dan Program yang dilaksanakan Kecamatan Semampir secara rasional akan menyentuh segala aspek dalam sebuah sistem organisasi, baik aspek internal (pemberi layanan = Petugas Pelayanan Kecamatan) maupun aspek eksternal (penerima layanan = masyarakat). Seperti dijelaskan dalam Program diatas, aspek eksternal yang dimaksud adalah masyarakat itu sendiri sebagai subyek sekaligus obyek dari pelayanan yang diberikan.

Apabila aspek internal dapat dicapai maka aspek eksternal akan secara otomatis tercapai. Kita analogikan seperti pelayanan yang terjadi dalam perusahaan swasta nasional maupun internasional, betapa petugas memberi layanan sangat bersahabat sekali sehingga penerima layanan merasa seperti raja, segala kebutuhan yang diinginkan penerima layanan dapat dengan cepat dan cermat dipenuhi oleh pemberi layanan.

4.1.3. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Kecamatan Semampir memiliki 6 (Enam) Program yang akan dilaksanakan, yakni :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini memiliki indikator program Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran dengan target pada tahun 2024 sebesar 87%. Adapun kegiatan pada tahun 2024 pagu anggaran 1.962.990.735,- yang menjadi penunjang program ini adalah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah dimana kegiatan ini merupakan kegiatan



dalam penyediaan barang dan jasa penunjang administrasi perkantoran di kecamatan Semampir.

2. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan

Program ini memiliki indikator program Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dengan target pada tahun 2024 sebesar 100% dan indikator Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik dengan target pada tahun 2024 sebesar 100%, sedangkan nilai total pagu anggaran Rp. 197.729.010,- Adapun kegiatan pada tahun 2024 yang menjadi penunjang program ini adalah Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran dimana kegiatan ini menunjang pemeliharaan aset sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi kecamatan Semampir.

3. Program Fasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah

Program ini memiliki indikator program Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi dengan target pada tahun 2024 sebesar 100% dengan nilai total pagu anggaran Rp. 150.629.400,- Adapun kegiatan pada tahun 2024 yang menjadi penunjang program ini adalah sebagai berikut :

- a. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja
Kegiatan ini merupakan kegiatan pemantauan wilayah yang dilakukan oleh polisi pamong praja dimana untuk menjaga keamanan, ketertiban dan stabilitas wilayah Kecamatan Semampir termasuk dengan kegiatan penegakan perda bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran.
- b. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Sarana Prasarana Wilayah
- c. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Kegiatan ini memiliki aktifitas melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap kader-kader lingkungan serta masyarakat untuk melakukan edukasi terhadap menjaga kebersihan lingkungan.
- d. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan



Kegiatan ini merupakan kegiatan pertemuan dalam rangka pengumpulan usulan dan aspirasi masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan

4. Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat

Program ini memiliki indikator program Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi dengan target pada tahun 2024 sebesar 100% dengan nilai total pagu anggaran Rp. 4.480.125.000,- Adapun kegiatan pada tahun 2024 yang menjadi penunjang program ini adalah sebagai berikut :

a. Operasional pengelolaan Administrasi LPMK,RW,RT

Kegiatan yang merupakan pemberian honorarium bagi ketua LPMK; Ketua RW dan Ketua RT se Kecamatan Semampir guna menunjang kegiatan administrasi pemerintahan

b. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Perekonomian

Kegiatan yang merupakan peningkatan kemampuan melalui pembinaan terhadap para UKM se Kecamatan Semampir

5. Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Program ini memiliki indikator program Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi dengan target pada tahun 2024 sebesar 100% dengan nilai total pagu anggaran Rp. 26.340.000,- Adapun kegiatan pada tahun 2024 yang menjadi penunjang program ini adalah sebagai berikut :

a. Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Merupakan kegiatan pembinaan dan sosialisasi kepada ibu-ibu dan anak-anak terkait pengarusutamaan gender. Meningkatkan pemberdayaan para wanita dalam beberapa aspek peningkatan ekonomi dan aspek-aspek lainnya

b. Pengumpulan, Verifikasi, dan Validasi Data Kesejahteraan Rakyat

Merupakan kegiatan yang menunjang pendataan dan melakukan verifikasi serta verifikasi masyarakat yang berpenghasilan rendah sekaligus melakukan pendataan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk dapat dilakukan intervensi lebih lanjut guna peningkatan kesejahteraan sosialnya.



c. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

Merupakan kegiatan guna memfasilitasi kebutuhan terpenuhinya sosialisasi dan kebutuhan akan adanya peningkatan pelayanan kependudukan dimana salah satunya penyediaan internet bagi RW di lingkungan kecamatan Semampir

6. Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan

Program ini memiliki indikator program Terasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan dengan target pada tahun 2024 sebesar 100% dengan nilai total pagu anggaran Rp. 33.948.139.061,- Adapun kegiatan pada tahun 2024 yang menjadi penunjang program ini adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ampel
- b. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pegirian
- c. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wonokusumo
- d. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ujung
- e. Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sidotopo

Kegiatan diatas merupakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana wilayah dengan pemberdayaan masyarakat dimasing-masing kelurahan dimana berisikan usulan-usulan musrenbang yang diakomodir pelaksanaannya di tahun anggaran 2024.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kec. Semampir
(Tabel T-C.31)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,42 %	24,738,392,915	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95,42 %	23,390,251,427	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	20,408,033,067	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	18,255,608,016	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Semampir	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	20,408,033,067	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Semampir	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan	18,255,608,016	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	4,037,802,062	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	4,867,707,617	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Semampir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	4,037,802,062	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Semampir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	4,867,707,617	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	292,557,786	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	266,935,794	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Semampir	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	292,557,786	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Semampir	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	266,935,794	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	94,882,790	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	88,013,990	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %		
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23.91 %				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23.91 %		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga	15,096,240	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga	15,096,240	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Semampir	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	15,096,240	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Semampir	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	15,096,240	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	636 Lembaga	41,212,800	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	636 Lembaga	34,344,000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Semampir	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30 Laporan	41,212,800	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Semampir	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30 Laporan	34,344,000	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	38,573,750	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	38,573,750	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Semampir	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen	14,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Semampir	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen	14,000,000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Kec. Semampir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	15,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Semampir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	15,000,000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Semampir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	9,573,750	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Semampir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	9,573,750	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindakanjuti konsep inovasi	62.5 %	20,574,508,600	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindakanjuti konsep inovasi	62.5 %	20,530,219,600	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	20,291,494,600	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	20,291,494,600	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Semampir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	24,080,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Semampir	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	24,080,000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ujung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,665,313,525	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ujung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,665,313,525	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wonokusumo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,274,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Wonokusumo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	2,274,000,000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ampel	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,354,210,998	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ampel	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,354,210,998	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sidotopo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,445,711,741	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sidotopo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,445,711,741	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pegirian	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,884,915,308	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pegirian	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,884,915,308	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ujung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2,497,970,287	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ujung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	2,497,970,287	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sidotopo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,168,567,612	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sidotopo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,168,567,612	

	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pegirian	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2,827,372,962	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pegirian	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2,827,372,962	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Wonokusumo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2,118,035,670	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Wonokusumo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	2,118,035,670	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ampel	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,031,316,497	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ampel	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,031,316,497	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	70 Lembaga	283,014,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	70 Lembaga	238,725,000	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	140 Unit Usaha				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi.	140 Unit Usaha		
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Semampir	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	17,280,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Semampir	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	17,280,000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Semampir	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	70 Unit	265,734,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Semampir	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	70 Unit	221,445,000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	134,285,520	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	134,285,520	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	16 Lokasi	134,285,520	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	16 Lokasi	134,285,520	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Semampir	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	134,285,520	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Semampir	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	134,285,520	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	38,364,800	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	38,364,800	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	210 Kasus	38,364,800	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	210 Kasus	38,364,800	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Semampir	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	561 Orang	15,000,000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Semampir	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	561 Orang	15,000,000	
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Semampir	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	23,364,800	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Semampir	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan	23,364,800	
	TOTAL				45,580,434,625	TOTAL				44,181,135,337	

BAB IV

PENUTUP

Renja Kecamatan Semampir Tahun 2024 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Kecamatan Semampir pada tahun 2023 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RKPD tahun 2024. Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semampir akan disempurnakan menjadi dokumen Renja 2023 berdasarkan Perwali tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024.

Renja Kecamatan Semampir Tahun 2024 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.



Surabaya, 6 Agustus 2023
Camat Semampir

YUNUS S.STP, M.A.P
Pembina Tk. I
NIP 197705061996021002